

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Antisipasi Bencana Tak Memadai

Di Jakarta dan kawasan sekitarnya, seperti Bekasi, program antisipasi bencana belum optimal. Di Ibu Kota, anggaran penataan bantaran kali untuk mencegah banjir pada 2019 dan 2020 tak memadai.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memotong anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dari awalnya Rp 850 miliar menjadi hanya Rp 350 miliar. Pemotongan sebesar Rp 500 miliar disebutkan karena defisit pendapatan dari target sebelumnya dalam APBD DKI Jakarta.

Untuk tahun 2020, anggaran pembebasan lahan pun diusulkan Rp 600 miliar, jauh lebih rendah dari anggaran pembangunan trotoar tahun 2020 sebesar Rp 1,2 triliun. Kebijakan anggaran pembebasan lahan yang minim ini dinilai akan menghambat program penataan sungai dari pemerintah pusat, yaitu program normalisasi sungai yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pembebasan lahan untuk penataan bantaran kali merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terhambatnya normalisasi berpotensi membuat banjir di DKI Jakarta meluas. Hal ini terlihat dari banjir pada Desember 2018 dan banjir Juni 2019. Sejumlah area yang sebelumnya tak lagi mengalami banjir parah kembali dilanda banjir, di antaranya di kawasan Deplu, Pondok Pinang, karena luapan Kali Pesanggrahan, kawasan Kampung Pulo dan Bidara Cina karena luapan Kali Ciliwung, serta Kuningan dan Cawang. Untuk Kuningan dan Cawang, Pemprov DKI mengklaim banjir terjadi karena saluran air rusak oleh pembangunan proyek LRT.

Di Kabupaten Bekasi, potensi bencana akibat sampah yang bertumpuk di Kali Jambe belum juga diatasi. Bertumpuknya sampah di Kali Jambe, tepatnya di sepanjang sekitar 1 kilometer antara Desa Jatimulya dan Desa Lambangsari, Ke-

camatan Tambun Selatan, berulang kali terjadi. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah plastik ataupun sampah non-organik lain dan sampah organik mencemari sungai serta lingkungan sekitar.

Camat Tambun Selatan Junaefi mengatakan, persoalan sampah di Kali Jambe tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebab, sampah di Kali Jambe tak hanya berasal dari warga yang bermukim di bantaran kali. Sampah tersebut juga berasal dari hulu Kali Jambe di Kota Bekasi.

"Sampah itu sebagian dari hulu atau sampah kiriman yang dibawa banjir saat hujan," katanya, Selasa (12/11/2019).

### Tidak substansial

Pemerhati masalah perkotaan dari Universitas Trisakti, Jakarta, Nirwono Joga, mengatakan, khususnya untuk pencegahan banjir di Ibu Kota secara substansial untuk jangka panjang, seharusnya ada empat langkah yang perlu diprioritaskan dan memperoleh anggaran memadai. Keempat langkah itu adalah penataan bantaran sungai, baik dengan normalisasi maupun naturalisasi, revitalisasi 109 situ, embung, dan waduk, rehabilitasi saluran air, serta penambahan daerah ruang terbuka hijau untuk resapan air.

Keempat program ini sesuai dengan empat jenis banjir yang mengancam Jakarta, yaitu banjir kiriman yang mengakibatkan sungai-sungai meluap, banjir lokal dari saluran air, banjir rob di pesisir pantai, dan gabungan ketiganya karena curah hujan yang tinggi.

"Penataan bantaran sungai mau tidak mau dilakukan, baik dengan naturalisasi maupun normalisasi. Ciliwung, misalnya, idealnya lebar 50 meter,

sekarang rata-rata baru 20 meter. Pemerintah sudah menentukan lebar 35 meter sebagai bentuk negosiasi dengan warga di bantaran," tutur Nirwono, kemarin.

Nirwono pun menilai anggaran revitalisasi trotoar yang lebih besar dari anggaran banjir tidak substansial dalam mengatasi kemacetan Jakarta. Revitalisasi trotoar hanya pendukung dalam mengatasi kemacetan, sementara langkah substansial mengatasi kemacetan seharusnya memprioritaskan melengkapi angkutan umum hingga menjangkau titik tujuan awal dan akhir serta integrasi.

Revitalisasi trotoar pun ia nilai baru berorientasi turisme, yaitu menyoar kawasan turisme seperti Cikini dan Kemang. Sementara untuk mendukung mengatasi kemacetan, revitalisasi seharusnya menyoar kawasan-kawasan di sekitar titik simpul angkutan umum massal.

### Satu juta sumur resapan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pencegahan banjir tetap berjalan, di antaranya dengan pengerukan kali, waduk, dan saluran air.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf menambahkan, Pemprov DKI menggalakkan program pembuatan sumur resapan yang ditargetkan mencapai 1 juta buah oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Untuk satu sumur resapan, anggarannya kira-kira Rp 1 juta. Ini dilakukan di seluruh SKPD, bukan Dinas Sumber Daya Air saja," kata Juaini.

Juaini mengatakan, terhambatnya normalisasi bantaran kali tak akan banyak berdampak pada pencegahan banjir Jakarta. Sebab, alur sungai su-

dah ada, sedangkan normalisasi hanya pemasangan beton (*sheetpile*) di pinggir kali.

(IRE/VAN)